

Rancangan Awal Tahun 2025



Renja

Dinas Perhubungan
Kab. Tanah Laut



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada ujung Selatan Pulau Kalimantan dimana berbatasan dengan laut pemisah Pulau Jawa dan Kalimantan serta berbatasan pula dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Mengingat semakin berkembangnya usaha pertambangan, pertanian, perkebunan dan peternakan maka sangat berpotensi untuk dikembangkan Pelabuhan Nasional yang dapat mendistribusikan SDA tersebut keluar daerah, luar propinsi maupun luar negeri dengan modal transportasi laut.

Selain itu, Kabupaten Tanah Laut yang juga berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang merupakan sentral ekonomi dan perdagangan di Propinsi Kalsel serta Kabupaten Tanah Laut yang merupakan jalur Trans Kalimantan pesisir selatan – timur maka hal ini menyebabkan arus lalu lintas orang dan barang dengan menggunakan moda transportasi darat untuk mendistribusikan hasil SDA di atas semakin lama akan semakin berkembang.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka diperlukan suatu rencana Kerja (RENJA) SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan yang mendasari penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun Laut 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat 3;
- c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat 3;
- d. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- e. Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- g. Permendagri nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- k. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 900.1.1.2/24/Bappeda/2024, tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai alat bantu pada setiap bidang serta unit kerja agar secara konsisten dan konsekuen menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja SKPD ini adalah terselenggaranya program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD dan RPD Tanah Laut.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renja ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. Penutup

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.

Dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 telah ditetapkan 3 Program 13 Kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.362.783.237,00 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub kegiatan ini berisi belanja penggandaan (fotocopy) dan penjiilidan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 2.537.200,00. realisasi keuangan sebesar Rp. 2.437.200,00 dengan progress 96,06 %

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatan ini berisi belanja ATK, penggandaan (fotocopy) dan penjiilidan.

Jumlah pagu anggaran Rp. 2.537.355,00. realisasi keuangan sebesar Rp. 2.315.400,00 dengan progress 91,25 %

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan ini berisi belanja gaji dan tunjangan ASN, iuran Jaminan Kesehatan ASN, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, iuran Jaminan Kematian ASN, iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN. Jumlah pagu anggaran Rp. 5.760.784.006,00. realisasi keuangan sebesar Rp. 5.054.768.645,00 dengan progress 97,74%

1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan ini berisi belanja jasa transaksi keuangan. Jumlah pagu anggaran Rp. 2.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.498.300,00. dengan progress 99,93 %

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Sub kegiatan ini berisi Belanja alat listrik seperti : baterai, isolasi, kabel, lampu, dan stop kontak.

Jumlah pagu anggaran Rp. 8.004.462,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 7.131.890,00. dengan progress 89,10 %

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Belanja ATK, peralatan & perlengkapan kantor dan belanja modal seperti : Meja, kursi , laptop, dan printer.

Jumlah pagu anggaran Rp. 228.975.258,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 203.636.320,00 dengan progress 88,93%

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Belanja penggandaan / fotocopy.



Jumlah pagu anggaran Rp. 9.999.768,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 9.620.000,00 dengan progress 96,20%

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Langganan Surat Kabar Barito Pos dan Surat Kabar Radar Banjarmasin.

Jumlah pagu anggaran Rp. 2.400.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.920.000,00 dengan progress 80,00%

1.3.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Belanja makan minum rapat, makan minum tamu, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam kota.

Jumlah pagu anggaran Rp. 390.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 356.979.737,00 dengan progress 91,53%

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Belanja tagihan telepon, air, dan belanja tagihan listrik.

Jumlah pagu anggaran Rp. 91.738.174,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 8.2604.586,00 dengan progress 90,04%

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Honorarium PTT (Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, petugas sopir, Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi lainnya), dan belanja luran Jaminan/Asuransi bagi Non ASN.

Jumlah pagu anggaran Rp. 1.205.885.376,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.181.008.656,00 dengan progress 97,94%

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Belanja pemeliharaan kendaraan dinas pejabat.
Jumlah pagu anggaran Rp. 29.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 28.988.500,00 dengan progress 99,96%
- 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
Jumlah pagu anggaran Rp. 251.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 245.590.000,00 dengan progress 97,84%.
- 1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pemeliharaan AC, HT, Laptop, PC, printer dan scanner.
Jumlah pagu anggaran Rp. 24.092.500,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 22.829.000,00 dengan progress 94,76%.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ).

2.1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Belanja pengadaan Traffic Cone, perjalanan dinas, belanja pengadaan rambu, dan pembangunan terminal

Jumlah pagu anggaran Rp. 3.388.994.949,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.935.094.000,00 dengan progress 86,61%.

2.1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan realisasinya 99,45%.

Jumlah pagu anggaran Rp. 20.113.200,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 20.002.200,00.



2.2 Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

2.2.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).

Belanja cetak karcis terminal capaiannya 97,89%.

Jumlah pagu anggaran Rp. 42.917.040,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 42.012.000,00.

2.3 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Belanja pengadaan jas hujan, makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh (suplemen), pakaian kerja, sepatu, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, perjalanan dinas, pengadaan kendaraan roda dua, dan belanja modal bangunan parkir, capaiannya 91,28%.

Jumlah pagu anggaran Rp. 1.157.033.725,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.056.091.050,00

2.4 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Modal Compressor, Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools), Belanja Modal Alat Ukur Universal, Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran, Belanja Modal System/Power Supply, Belanja Modal Peralatan Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Jaringan, Belanja Modal Sepatu Lapangan, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software.



Jumlah pagu anggaran Rp. 368.394.509,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 308.972.341,00 dengan progres capaian 83,87%.

2.4.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Belanja Jasa Kalibrasi, Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-AlatPenguji Kendaraan Bermotor, dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.

Jumlah pagu anggaran Rp. 243.040.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 223.483.147,00. dengan progress 91,95%.

2.5 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.5.1 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini berisi Belanja banner / spanduk, belanja rompi, topi, tiang rambu portable, makan minum aktivitas lapangan, Konsultan Penyusunan Traffic Counting, perjadin, dan tenda kerucut.

Jumlah pagu anggaran Rp. 125.990.650,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 122.581.500,00 dengan progress 97,29%.

2.5.2 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini berisi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-PerlengkapanDinas, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TimPelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Perhubungan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Modal Sepatu Lapangan, Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya,

Jumlah pagu anggaran Rp. 215.669.855,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 207.663.000,00 progressnya mencapai 96,29%.

- 2.5.3 Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- Sub kegiatan ini berisi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Jumlah pagu anggaran Rp. 10.374.880,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 9.472.000,00 progressnya sudah mencapai 91,30%.
- 2.6 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 2.6.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- Sub kegiatan ini berisi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, dan perjalanan dinas, Jumlah pagu anggaran Rp. 25.743.680,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 24.843.020,00 dengan progress 96,50%.
- 2.6.2 Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
- Sub kegiatan ini berisi Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Jumlah pagu anggaran Rp. 17.306.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 11.945.000,00. dengan progress 69,02%.
- 2.7 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan ini berisi belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pemeliharaan operasional bus, perjalanan dinas, dan belanja modal bangunan parkir.
- Jumlah pagu anggaran Rp. 710.382.650,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 606.685.782,00 dengan progress 85,40%.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

3.1 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, dan perjalanan dinas. capaian kinerjanya mencapai 99,50%.

Jumlah pagu anggaran Rp. 27.368.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 27.230.500,00.

Jumlah realisasi keuangan seluruhnya terserap sebesar **89,11%**

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2023 seperti tampak pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.009.454.099		1.383.984.674		2.358.955.901		1.616.023.359		1.843.364.300		7.202.328.234		89,92%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.074.555		675.200		100.000		2.505.400		1.472.000		4.752.600		93,66%
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	7	2.537.200	3	675.200	1	100.000	2	1.262.000	1	400.000	7	2.437.200	100,00%	96,06%
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	2.537.355	1	-	1	-	2	1.243.400	2	1.072.000	6	2.315.400	100,00%	91,25%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.763.284.006		884.493.263		1.837.289.085		1.144.153.298		1.191.331.299		5.057.266.945		87,75%
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	5.760.784.006	32	884.493.263	36	1.836.274.085	36	1.144.153.298	36	1.189.847.999	36	5.054.768.645	100,00%	87,74%
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	2.500.000	-	-	2	1.015.000	-	-	3	1.483.300	5	2.498.300	100,00%	99,93%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			
				I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			639.379.488		154.670.672		111.614.596		82.193.924		230.808.755		579.287.947		90,60%
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.004.462	1	7.131.890	1	-	1	-	1	-	1	7.131.890	100,00%	89,10%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	228.975.258	2	39.263.030	2	26.820.000	2	7.886.640	2	129.666.650	8	203.636.320	100,00%	88,93%
	▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	9.999.768	1	3.120.000	1	-	1	3.500.000	1	3.000.000	1	9.620.000	100,00%	96,20%
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.400.000	1	320.000	1	480.000	1	320.000	1	800.000	1	1.920.000	100,00%	80,00%
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	190	390.000.000	48	104.835.752	54	84.314.596	24	70.487.284	64	97.342.105	190	356.979.737	100,00%	91,53%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.297.623.550		300.754.139		312.459.220		319.997.337		330.402.546		1.263.613.242		97,38%
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	91.738.174	3	19.761.061	3	19.227.490	3	20.888.812	3	22.727.223	12	82.604.586	100,00%	90,04%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			
					I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.205.885.376	3	280.993.078	3	293.231.730	3	299.108.525	3	307.675.323	12	1.181.008.656	100,00%	97,94%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			304.092.500		43.391.400		97.493.000		67.173.400		89.349.700		297.407.500		97,80%		
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	29.000.000	1	3.712.500	1	7.859.000	1	12.335.000	1	5.082.000	1	28.988.500	100,00%	99,96%		
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	251.000.000	9	37.271.900	9	84.372.000	9	47.754.400	9	76.191.700	9	245.590.000	100,00%	97,84%		
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	24.092.500	10	2.407.000	24	5.262.000	2	7.084.000	14	8.076.000	50	22.829.000	100,00%	94,76%		
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100,00%	89,92%
					Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tingg

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		
				I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			6.325.961.138		148.046.000		379.788.770		1.734.963.587		3.306.046.683		5.568.845.040		88,03%
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3.409.108.149		945.000		34.660.000		1.321.778.774		1.597.712.426		2.955.096.200		86,68%
	▪ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	33	3.388.994.949	-	945.000	-	34.660.000	33	1.301.776.574	-	1.597.712.426	33	2.935.094.000	100,00%	86,61%
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1	20.113.200	-	-	-	-	1	20.002.200	-	-	1	20.002.200	100,00%	99,45%
2.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			42.917.040		-		42.012.000		-		-		42.012.000		97,89%
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	*Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	42.917.040	1	-	-	42.012.000	-	-	-	-	1	42.012.000	100,00%	97,89%
3.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			1.157.033.725		5.945.000		67.742.250		19.073.500		963.330.300		1.056.091.050		91,28%
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	1.157.033.725	3	5.945.000	3	67.742.250	3	19.073.500	3	963.330.300	12	1.056.091.050	100,00%	91,28%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)			
				I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			611.434.509		-		79.335.000		212.154.528		240.965.960		532.455.488		87,08%
	▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	368.394.509	1	-	1	79.335.000	1	156.723.341	1	72.914.000	1	308.972.341	100,00%	83,87%
	▪ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prsarana Pengujian Kendaraan Bermotor Terpelihara (Unit)	12	243.040.000	-	-	-	-	12	55.431.187	-	168.051.960	12	223.483.147	100,00%	91,95%
5.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			352.035.385		90.969.500		65.581.000		38.887.000		144.279.000		339.716.500		96,50%
	▪ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	125.990.650	-	2.797.500	-	14.775.000	-	6.810.000	1	98.199.000	1	122.581.500	100,00%	97,29%
	▪ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	215.669.855	3	88.172.000	3	48.556.000	3	32.077.000	3	38.858.000	12	207.663.000	100,00%	96,29%
	▪ Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	4	10.374.880	1	-	1	2.250.000	1	-	1	7.222.000	4	9.472.000	100,00%	91,30%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			43.049.680		880.000		3.263.020		5.900.000		26.745.000		36.788.020		85,45%
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	12	25.743.680	3	880.000	3	3.263.020	3	5.510.000	3	15.190.000	12	24.843.020	100,00%	96,50%
	▪ Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	*Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	5	17.306.000	1	-	2	-	1	390.000	1	11.555.000	5	11.945.000	100,00%	69,02%
7.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			710.382.650		49.306.500		87.195.500		137.169.785		333.013.997		606.685.782		85,40%
	▪ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	4	710.382.650	4	49.306.500	4	87.195.500	4	137.169.785	4	333.013.997	4	606.685.782	100,00%	85,40%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	88,03%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			27.368.000		3.262.500		4.785.000		6.836.000		12.347.000		27.230.500		99,50%
1.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			27.368.000		3.262.500		4.785.000		6.836.000		12.347.000		27.230.500		99,50%
	▪ Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	27.368.000	-	3.262.500	-	4.785.000	-	6.836.000	1	12.347.000	1	27.230.500	100,00%	99,50%
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,50%
					Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			14.362.783.237		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										100,00%	89,11%
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sesuai aturan tersebut diatas dapat disampaikan melalui Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1.	Rasio Konektivitas kabupaten/kota	Rasio		√	0,22	0,22	0,33	0,44	0,5	0,22	0,22	0,33	0,93	1,14	

Adapun analisis dari capaian pada table tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Rasio Konektivitas KabupatenKota (IK.1/ Angkutan Jalan)

Trayek Angkutan Perintis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu	Bobot	Jumlah Trayek
1	Pelaihari - Tabanio (Kec. Takisung)	7	1	1
2	Pelaihari - Batakan (Kec. Panyipatan)	7	1	1
3	Pelaihari - Jorong (Kec. Jorong)	7	1	1
4	Pelihar – Bati-Bati (angkutan umum Feeder)	28	1	1
Jumlah			4	4

Trayek Angkutan Pelajar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu	Bobot	Jumlah Trayek
1	Pelaihari – Sei Jelai (Kec. Tambang Ulang)	6	1	1
2	Pelaihari- PTPN XIII	6	1	1
3	Pelaihari- Bajuin	6	1	1
Jumlah				3

Data Trayek Tambahan Dalam 5 Tahun (2019 -2023)

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu
1	Pelaihari - Riam Pinang (Kec. Bajuin)	1
2	Pelaihari - Bumi Makmur (Kec. Bumi Makmur)	1

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu
3	Pelaihari - Bentok Darat (Kec. Bati-Bati)	1
4	Pelaihari - Batu Ampar (via Pemalongan)	1
5	Pelaihari - Ujung Batu (via Panjaratan)	1
6	Pelaihari -Panyipatan (via Tajau Pecah)	1
Jumlah		6

No.	Bobot Trayek	
1	Bobot Trayek Frekuensi Tinggi (>5 X dalam seminggu)	1
2	Bobot Trayek Frekuensi Tinggi (3 - 4 dalam seminggu)	0,8
3	Bobot Trayek Frekuensi Tinggi (< 3 dalam seminggu)	0,5

Perhitungan konektivitas IK.1 nya adalah sebagai berikut :

$$IK.1 = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten (Tahun 2023)} \times \text{Bobot Trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}}$$

$$\text{Jadi IK.1} = \frac{7 \times 1}{13} = 0,54$$

- b. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (IK.2 / Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)

No.	Trayek	Frekuensi Dalam 1 Minggu	Bobot	Keterangan
1	Tanjung Dewa - Pulau Datu	± 56 kali / minggu	1	Obyek wisata pulau datu
2	Muara Kintap - Kampung Bugis Seberang	± 90 kali / minggu		Dermaga Sungai Desa Muara Kintap
3	Panjaratan - Wisata Batakan	± 2 kali / minggu		Wisata Susur Sungai
4	Muara Asam Asam - Pulau Keramaian			Rencana
5	Muara Asam Asam - Pulau Masa Lembu			Rencana
Jumlah		± 148 kali / minggu	1	5 Kebutuhan Trayek

$$IK.2 = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten (Tahun 2023)} \times \text{Bobot Trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}}$$

$$\text{Jadi IK.2} = \frac{3 \times 1}{5} = 0,6$$

Dengan demikian Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah 1,14.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan - permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk kedepannya adalah :

1. Belum optimalnya aksesibilitas jaringan transportasi dalam trayek Kabupaten Tanah Laut.
2. Perkembangan transportasi berbasis air belum dapat dipenuhi sesuai apa yang diharapkan.

3. Kemampuan teknis, kemampuan manajerial dan kemampuan sikap SDM Perhubungan perlu ditingkatkan.
4. Belum aktualnya system informasi, teknologi dan prosedur pelayanan.
5. Belum optimalnya potensi dan sinergitas jejaring sumber daya.
6. Belum terwujudnya penataan manajemen, pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan standarisasi.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD agar selalu dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka terdapat beberapa isu penting yang harus diperhatikan yang dapat terbagi menjadi isu teknis dan isu non teknis.

Isu Teknis yang harus diperhatikan antara lain :

- Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsi SKPD
- Waktu dan jadwal
Yaitu waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Dengan memperhatikan waktu tersebut, maka dapat direncanakan jadwal untuk pelaksanaan pekerjaan agar tercapai dengan sesuai target.
- Regulasi Hukum
Regulasi hukum yang merupakan dasar dari pelaksanaan semua tugas dan fungsi SKPD merupakan salah satu hal yang penting sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD tidak berjalan secara asal dan sembarangan.

Masalah Non Teknis yang dihadapi antara lain adalah :

- Faktor Alam
Faktor alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang disebabkan antara lain karena musim hujan dan lain-lain. Musim hujan yang tidak dapat ditebak menyebabkan jadwal pelaksanaan kegiatan terganggu.
- Faktor Sosial Masyarakat
Terdapat faktor sosial yakni Keadaan masyarakat yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Kondisi yang sedang terjadi di masyarakat harus diperhatikan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari instansi terkait yang langsung ditujukan kepada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
A.	Dinas Perhubungan (Bidang-Bidang dan Sekretariat)				33.014.488.246		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.688.837.380		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.500.000	Swakelola	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.500.000	Swakelola	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.368.553.606		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6.366.053.606	Swakelola	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	2.500.000	Swakelola	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				408.404.462		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.004.462	Swakelola	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	105.000.000	Swakelola	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Swakelola	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000	Swakelola	
	Penyediaan Bahan/Material	SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	13.000.000	Swakelola	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	270.000.000	Swakelola	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.444.879.312		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.500.000	Swakelola	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.293.379.312	Swakelola	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				462.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	31.000.000	Swakelola	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	259.000.000	Swakelola	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	22.000.000	Swakelola	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Penunjukan Langsung	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				23.325.650.866		
1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				100.000.000		
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Pemilihan Langsung	
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				21.803.275.986		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	327 Unit	21.683.275.986	Tender / Seleksi	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Tanah Laut	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	120.000.000	Penunjukan Langsung	
3.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				410.374.880		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	250.000.000	Swakelola	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	10.374.880	Swakelola	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	150.000.000	Swakelola	
4.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				112.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15 Laporan	40.000.000	Swakelola	
	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	40.000.000	Swakelola	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	8 Laporan	32.000.000	Swakelola	
5.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				900.000.000		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	900.000.000	Swakelola	
B.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor				1.220.000.000		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.000.000		
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				25.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPT PKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Swakelola	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPT PKB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Swakelola	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.195.000.000		
1.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.195.000.000		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.000.000.000	Tender	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1800 Dokumen	45.000.000	Swakelola	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	150.000.000	Swakelola	
C.	UPTD Terminal dan Perparkiran				860.000.000		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				85.000.000		
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPT Terminal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Swakelola	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPT Terminal	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Swakelola	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				775.000.000		
1.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				525.000.000		
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	UPT Terminal	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	500.000.000	Tender	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	UPT Terminal	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	25.000.000	Swakelola	
2.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				250.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	UPT Terminal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	250.000.000	Swakelola	
D.	UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan				1.179.036.088		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.000.000		
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				25.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPT Pelabuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Swakelola	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPT Pelabuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Swakelola	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				1.154.036.088		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPT Pelabuhan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.000.000	Swakelola	
2.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				1.124.036.088		
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kec. Panyipatan	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	1.124.036.088	Tender	
TOTAL PAGU ANGGARAN KESELURUHAN					36.273.524.334		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut juga harus merujuk pada Renstra kementerian perhubungan untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan transportasi dalam kurun waktu 2020-2024 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas keseluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden RI adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERDASATRKAN GOTONG ROYONG.”

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam mendukung visi dan misi Presiden RI, Kementrian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional **Prioritas Nasional 5** yaitu **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024 tersebut Kementrian Perhubungan merumuskan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu :

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya indeks kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya level keselamatan dan keamanan perhubungan.

Dari telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mempunyai Visi sebagai berikut :

TERWUJUDNYA TRANSPORTASI TANAH LAUT YANG MANTEB

(Memadai, Aman, Nyaman, Terjangkau, Edukatif dan Berkeselamatan)

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas maka Dinas Perhubungan melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Terbukanya jaringan transportasi laut yang memenuhi standar nasional dan internasional
2. Terwujudnya sistem transportasi yang aman, nyaman, tertib dan terkendali
3. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
4. Meningkatkan disiplin aparatur, dan sumber daya manusia (SDM) perhubungan sesuai kompetensi dan kualifikasinya
5. Mengoptimalkan kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan RENSTRA 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan :

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah.

3.2.2. Sasaran :

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Dishub Kabupaten Tanah Laut selama 3 (tiga) tahun ke depan seperti tampak pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas		Indeks infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas	Indeks infrastruktur perhubungan	64,25	65,55	26,9	33,49	40,11
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Kabupaten	67,28	67,52	70,01	75,00	80,01
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	72,80	71,80	75,00	78,00	80,01

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, dalam peningkatan ekonomi masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas;
- Terwujudnya konektivitas kabupaten/kota;
- Membangun sistem angkutan umum masal berbasis jalan dengan menyiapkan Bus Angkutan Feeder dari Halte BRT Bati-bati ke Pelabuhan;
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Untuk mencapai sasaran RPD tahun 2024-2026 yang sekaligus menjadi tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menggunakan 3 program 15 kegiatan, dan 33 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. **36.273.524.334,00**.

c. Tabel rencana program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026, adalah seperti tampak pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
			Dinas Perhubungan (Bidang-Bidang dan Sekretariat)				35.788.549.867					32.923.639.586
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP Dinas Kabupaten	75					80,1	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan				Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	78					80,01	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		IKM sekretariat Dishub	83	9.214.502.684				85	9.697.988.720
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.966.948				100%	5.000.000
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.498.144	APBD II		Belanja ATK, penjiilidan, (dokumen)	7 Dokumen	2.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.468.804	APBD II		Belanja ATK, penjiilidan, (dokumen)	6 Laporan	2.500.000
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.047.090.950				100%	6.527.704.946
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	6.045.103.666	DAU		Belanja Gaji dan TPP ASN	37 Orang/bulan	6.525.204.946
		2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	1.987.284	APBD II		Jasa Transaksi Keuangan	5 Dokumen	2.500.000
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	408.568.826				100%	408.404.462
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.002.557	APBD II		Pembelian Bolam Lampu, Kabel, Saklar, Stop Kontak	6 Paket	8.004.462
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	103.166.679	APBD II		Belanja Atk, Laptop, Pc, Printer	8 Paket	105.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.999.590	APBD II		Fotocopy	1 Paket	10.000.000
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000	APBD II		Belanja Rekening Koran	1 Dokumen	2.400.000
		2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	APBD II		Belanja Material Pameran	2 Paket	13.000.000
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	270.000.000	APBD II		Belanja Makmin, Perjadin	190 Laporan	270.000.000
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.443.875.960				100%	2.444.879.312
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151.500.000	APBD II		Belanja Rekening Listrik dan Air	12 Laporan	151.500.000
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.292.375.960	APBD II		Belanja Gaji PTT	12 Laporan	2.293.379.312

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	310.000.000				100%	312.000.000
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	31.000.000	APBD II		Belanja Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 Unit	31.000.000
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	259.000.000	APBD II		Belanja Pemeliharaan Mobil Operasional	9 Unit	259.000.000
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	20.000.000	APBD II		Pemeliharaan, AC, Printer, Komputer, HT	50 Unit	22.000.000
		2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0					

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas					Indeks infrastruktur	54,21					60,49	
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas				Indeks infrastruktur perhubungan	33,49					40,11	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,35	26.574.047.183				0,35	23.225.650.866
					2. Persentase prasaranan perhubungan	66,70%					100%	
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Prosentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Tanah Laut	100%	100.000.000				100%	-
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	APBD II		Belanja Reviu dok. RIJJ		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten Tanah Laut	63,60%	25.219.900.856				100%	21.803.275.986
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	327 Unit	25.107.232.856	APBD II		Belanja, Rambu, Warning Light, Cermin Cembung, RPPJ , APJ	327 Unit	21.683.275.986
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Tanah Laut	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	112.668.000	APBD II		Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan, APJ	100 Unit	120.000.000
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase ruas jalan kabupaten yang dilakukan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	46,85%	352.488.211				74,22%	410.374.880
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	249.999.583	APBD II		Belanja, kegiatan razia, honor tim, perjadi	12 Laporan	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	9.000.000	APBD II		Belanja Makmin Rapat	6 Laporan	10.374.880
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Laut	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	93.488.628	APBD II		Belanja Perjadin, Makmin, Survey	12 Laporan	150.000.000
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase dokumen andalalin yang diterbitkan	100%	83.174.116				100%	112.000.000
		2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15 Laporan	24.918.116	APBD II		Perjalanan dinas dalam daerah	15 Laporan	40.000.000
		2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	39.911.000	APBD II		Biaya kepesertaan diklat andalalin	2 Orang	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kab. Tanah Laut	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	8 Laporan	18.345.000	APBD II		Perjadin, honor tim, makmin	8 Laporan	32.000.000
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan umum untuk angkutan orang yang tersedia	6 unit	818.484.000				6 unit	900.000.000
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit	818.484.000	APBD II		Belanja Operasional Pemeliharaan, Bbm, Perjadin (Langkar Dan Lakatan)	6 Unit	900.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor				5.219.107.837					220.000.000
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP Dinas Kabupaten	75					80,1	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan				Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	78					80,01	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM sekretariat Dishub	83	24.993.349				85	25.000.000
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	24.993.349				100%	25.000.000
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPT PKB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.998.742	APBD II		Belanja ATK	1 Paket	15.000.000
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPT PKB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.994.607	APBD II		Belanja Potocopy, Jilid	1 Paket	10.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas					Indeks infrastruktur	54,21					60,49	
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas				Indeks infrastruktur perhubungan	33,49					40,11	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,35	5.194.114.488				0,35	195.000.000
					2. Persentase prasarana perhubungan	66,70%					100%	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang terlayani	75%	5.194.114.488				100%	195.000.000
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	4.994.114.488	APBD II		Pembangunan gedung uji		
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1800 Dokumen	45.000.000	APBD II		Pengadaan BLUe	1800 Dokumen	45.000.000
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPT PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	155.000.000	APBD II		Pemeliharaan alat uji dan kalibrasi	12 Unit	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			UPTD Terminal dan Perparkiran				621.852.744					860.000.000
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP Dinas Kabupaten	75					80,1	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan				Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	78					80,01	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM sekretariat Dishub	83	92.944.727				85	85.000.000
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	92.944.727				100%	85.000.000
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPT Terminal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.993.627	APBD II		Belanja ATK	1 Paket	15.000.000
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPT Terminal	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	69.951.100	APBD II		Belanja Potocopy, Jilid , dan Karcis	1 Paket	70.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas					Indeks infrastruktur	54,21					60,49	
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas				Indeks infrastruktur perhubungan	33,49					40,11	
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Indeks Kelancaran Lalulintas	0,35	528.908.017				0,35	775.000.000
					2. Persentase prasarana perhubungan	66,70%					100%	
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase sarana dan prasarana terminal tipe C yang memenuhi standar	75%	528.908.017				100%	525.000.000
		2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	UPT Terminal	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit	497.988.017	APBD II		Pengadaan fasilitas pendukung terminal	2 Unit	500.000.000
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	UPT Terminal	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0	APBD II		Pemeliharaan fasilitas terminal	1 Unit	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kemendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	66,60%	30.920.000				100%	250.000.000
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	UPT Terminal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	30.920.000	APBD II		Imbal Jasa, dan Perjadin	12 Laporan	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan				1.172.206.233					55.000.000
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja internal Pemerintah Daerah					Nilai SAKIP Dinas Kabupaten	75					80,1	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja internal Dinas Perhubungan				Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	78					80,01	
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM sekretariat Dishub	83	18.498.424				85	25.000.000
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	18.498.424				100%	25.000.000
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPT Pelabuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.498.669	APBD II		Belanja ATK	1 Paket	15.000.000
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	UPT Pelabuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.999.755	APBD II		Belanja Potocopy, Jilid	1 Paket	10.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas					Indeks infrastruktur	54,21					60,49	
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas				Indeks infrastruktur perhubungan	33,49					40,11	
		2.15.02	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten	100%	1.153.707.809				100%	30.000.000
		2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	29.970.000				100%	30.000.000
		2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPT Pelabuhan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam	1 Laporan	29.970.000	APBD II		Perjadin, BBM	1 Laporan	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Belanja Inti / Utama	Rencana Tahun 2026	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Daerah Kabupaten/Kota							
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	1.123.737.809					
		2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kec. Panyipatan	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	1.123.737.809	APBD II		Pengadaan Dermaga Penyeberangan		
		TOTAL PAGU ANGGARAN KESELURUHAN					42.801.716.681					34.058.639.586

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai panduan dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan / program/ kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Renja-Perubahan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ini didasarkan pada :

1. Kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
2. Semua unit kerja yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Laut.
4. Arahan dari pimpinan instansi (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut)
5. Berprinsip Dinamis yaitu siap mengikuti perubahan baik internal maupun eksternal.

Pelaihari, 10 Januari 2024,
Kepala Dinas,

JABATAN	PARAF
Sekretaris Dinas	
Kasubbag Perencanaan & Keuangan	


DANOE SULAIMAN,SH
NIP. 19801125 200212 1 003

SK Tim Penyusun Renja 2025



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. A. Syairani Pelaihari 70814 Telp. (0512)-21035 Fax.(0512)-
21035

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 500.11.1/46 - RENKEU /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-

- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 7. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 900.1.12/24/Bappeda/2024, tanggal 4 Januari 2024, tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPDTahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas:

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut;
7. Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan dengan pemangku kepentingan terkait;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu,

10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada Tanggal : 23 Januari 2024

Kepala Dinas,



DANOE SULAIMAN,SH

NIP. 19801125 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Nomor : 500.II.1/46-RENKEU/2024
Tanggal : 23 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Danoe Sulaiman, SH NIP. 19801125 200212 1 003	Kepala Dinas	Ketua
2.	Tedy Mulyana, ST,MT NIP. 19800617 200501 1 007	Sekretaris	Wakil Ketua
3.	DIANSYAH, ST NIP: 19770404 200903 1 009	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan	Koordinator I
4.	Andri Triyanto C, LLASDP NIP. 19821213 200312 1 004	Plt.Kepala Bidang Lalu Lintas & Angkutan	Koordinator II
5.	Daryono, A.Md NIP. 19780405 200501 1 011	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Anggota
6.	Hj. Harni Rahayu, Si.Kom NIP. 19800810 200801 2 040	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Andri Triyanto C, LLASDP NIP. 19821213 200312 1 004	Kepala Seksi Lalu Lintas	Anggota
8.	Rahmat Hidayat, A,Md NIP. 19790512 200801 1 016	Kepala Seksi angkutan	Anggota
9.	Suriadi Habiyani,S.I.Kom NIP. 19780417 200901 1 001	Kepala Seksi Prasarana	Anggota
10	Supiansyah, S.Kom NIP. 19790508 200604 1 019	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan	Anggota
11	Prawono,S.Sos NIP. 19660408 199103 1 010	Kepala UPT PKB	Anggota
12	Riswan Akbar NIP. 19820501 200701 1 007	Kepala UPT Terminal dan Perparkiran	Anggota
14	Abdurahman Sidik , S.I,Kom NIP. 19790315 200801 1 017	Kepala UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	Anggota

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
15	Novan Andidyan, S.Tr NIP. 19830210 201001 1 001	Kasubag TU UPT PKB	Anggota
16	Pidi Mashudi Jamil, A.Md NIP. 19790521 201101 1 001	Kasubag TU UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	Anggota
17	ROSARIA YUNIZA ,A. Md NIP: 19730607 200701 2 013	Kasubag TU UPT Terminal dan Perparkiran	Anggota

Pelaihari, 23 Januari 2024

Kepala Dinas,



DANOE SULAIMAN,SH

NIP. 19801125 200212 1 003